

**ANALISIS KINERJA PADA BADAN KESBANGPOL & LINMAS  
(ANGGARAN BELANJA DAN REALISASINYA)  
DI KABUPATEN KUTAI BARAT**

Ririn Suryanti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Manajemen

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia.

ririnsuryanti@yahoo.com

**ABSTRACT**

*Regardless of the weaknesses and shortcomings that exist in it, the birth of Law. And No. 22. 25, among others, is the embodiment of the government's pergesean system, the centralized system to the decentralized system. Both the Act contains some explicit mission. First, create efficiency and effectiveness of resource management area. Second, improve the quality of public services and social welfare. Third, empower and create a space for people to participate in the development process. To realize this mission, the necessary changes to local government financial management system. The changes implemented by giving autonomy to regions based on the principle of decentralization in the form of autonomy, real and responsible.*

*The purpose of this study was to determine whether the implementation of regional autonomy shows performance Performance Unit (SKPD) Kesbangpol & Community Protection Agency West Kutai district is likely to increase in 2011 compared to 2010.*

*Performance analysis shows that the Regional Working Units (SKPD) Kesbangpol & Community Protection Agency West Kutai regency in 2011 tended to increase compared to 2010. Based on a comparative analysis of absolute data in 2011 Revenue and Expenditure can eventuated by 95.58% while in 2010 Revenue and Expenditure amounted to 94.89% eventuated.*

*Based on the analysis, the authors provide some suggestions that regional work units (on education) Kesbangpol & Community Protection Agency and should be able to continue to maintain and improve the performance achieved so far, and future. And furthermore should further enhance coordination between each field in carrying out activities in accordance with the Budget Implementation Document (DPA) or Document Change Executive Budget (DPPA) that exist so as to achieve the targets set.*

*Keyword: Budget and Actual*

**PENDAHULUAN**

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesbangpol & Linmas Kabupaten Kutai Barat tahun 2010 – 2011, disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari yang di rencanakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisien penggunaan anggaran ke dalam program / kegiatan, untuk menjamin setiap alokasi anggaran untuk membiayai proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkompeten dan bertanggungjawab dalam proses pencapaiannya

Pada tahun 2010 alokasi anggaran Badan Kesbangpol & Linmas sebesar Rp 9.248.605.201 dan terealisasi sebesar 93,61 %, dan pada tahun 2011 alokasi anggaran sebesar Rp 12.606.093.912,88 dan dapat terealisasi sebesar 95,85 % dari anggaran tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini ditentukan judul : "Analisis Kinerja Badan Kesbangpol & Linmas (Anggaran Belanja dan Realisasinya) di Kabupaten Kutai

Barat”. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesbangpol & Linmas Kabupaten Kutai Barat tahun 2011 cenderung meningkat dibandingkan tahun 2010.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Definisi Operasional**

Sesuai dengan UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan presentasi kerja (Kinerja) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesbangpol & Linmas yaitu gambaran mengenai pencapaian kinerja dan hasil-hasil yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesbangpol & Linmas selama periode tahun 2010-2011.

### **B. Rincian Data Yang Digunakan**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Gambaran umum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesbangpol & Linmas Kabupaten Kutai Barat
- 2) Struktur organisasi dan deskripsi jabatan
- 3) Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah periode tahun 2010 - 2011
- 4) Neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan

### **C. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Badan Kesbangpol & Linmas di Kabupaten Kutai Barat, yang memfokuskan pada laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesbangpol & Linmas tersebut, yang berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus kas dan Catatan Laporan Keuangan tahun 2010-2011. Laporan keuangan tersebut yang akan digunakan untuk menganalisis Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesbangpol & Linmas tersebut.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Fieldwork Research*)
2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*),

### **E. Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis**

#### **1. Alat Analisis**

Alat analisis yang digunakan untuk menjelaskan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesbangpol & Linmas adalah analisis perbandingan laporan keuangan yang merupakan suatu metode analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dari dua periode atau lebih.

#### **2. Pengujian Hipotesis**

Jika Pelaksanaan Otonomi Daerah Menunjukkan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesbangpol & Linmas Tahun 2011 meningkat dibandingkan Tahun 2010 maka hipotesis diterima, tetapi jika Pelaksanaan Otonomi Daerah Menunjukkan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesbangpol & Linmas Tahun 2011 tidak meningkat dibandingkan Tahun 2010 maka hipotesis ditolak.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Badan Kesbangpol & Linmas**

#### **1. Sejarah Singkat Badan Kesbangpol & Linmas**

Badan Kesbangpol & Linmas Kabupaten Kutai Barat yang terbentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Kedudukan dan Organisasi Badan Kesbangpol & Linmas Kabupaten kutai Barat. Perubahan Peraturan Daerah tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2003 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi dilingkungan Departemen Dalam Negeri, perubahan dimaksud guna lebih memaksimalkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol & Linmas dalam kaitannya memelihara ketertiban, ketentraman dan keamanan dimasyarakat, kemudian untuk menjaga situasi dan kondisi stabilitas daerah agar tetap kondusif baik dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun dibidang keamanan dan ketertiban.

#### **2. Visi dan Misi Badan Kesbangpol & Linmas**

Bentuk Visi dan Misi Badan Kesbangpol & Linmas adalah sebagai berikut :

- a) Visi :  
"Terwujudnya Kutai Barat yang Masyarakatnya Semakin sejahtera dan berwawasan berkebangsaan dan berpolitik serta penuh dedikasi dalam mempertahankan dan menciptakan stabilitas politik yang dinamis, kondusif, demokratis serta memberikan

perlindungan kepada semua lapisan masyarakat. "

#### **b) Misi**

- 1) Terciptanya iklim kehidupan kebangsaan yang dinamis yang berbasis pada sistem politik yang demokrasi dan meningkatkan fungsi supra dan insfra struktur politik serta makin mantapnya nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa Indonesia.
- 2) Menjaga situasi dan kondisi daerah yang tentram, tertib, aman dan terkendali.

#### **3. Tujuan Badan Kesbangpol & Linmas**

Sejalan dengan visi dan misi Badan Kesbangpol & Linmas tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dirumuskan sebagai berikut :

- a) Terwujudnya stabilitas politik yang dinamis dan kondusif bagi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Barat.
- b) Terwujudnya tatanan kehidupan berbangsa dan sistem politik yang demokratis dan dinamis berdasarkan kedaulatan rakyat, yang menghormati kebhinekaan.

#### **4. Sasaran**

Berdasarkan fokus sasaran tersebut secara lebih operasional, maka Badan Kesbangpol & Linmas Kabupaten Kutai Barat menetapkan sasaran sebagai berikut :

- a) Terbangunnya wawasan dan watak kebangsaan bagi seluruh warga masyarakat.
- b) Terpeliharanya persatuan dan kesatuan masyarakat sebagai bagian integral bangsa Indonesia serta keutuhan wilayah negara dan daerah.

## A. Analisis

URAIAN	2011	2010	SELISIH	KET
<b>ASET</b>				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	16.714.592,00	37.177.244,00	(20.462.652,00)	-55,04%
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>16.714.592,00</b>	<b>37.177.244,00</b>	<b>(20.462.652,00)</b>	
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	4.508.056.325,00	2.458.727.375,00	2.049.328.950,00	83,35%
Aset Tetap Lainnya	4.834.000,00	41.134.000,00	(36.300.000,00)	-88,25%
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>4.512.890.325,00</b>	<b>2.499.861.375,00</b>	<b>2.013.028.950,00</b>	<b>80,53%</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>4.529.604.917,00</b>	<b>2.537.038.619,00</b>	<b>1.992.566.298,00</b>	<b>78,54%</b>
<b>EKUITAS DANA</b>				
EKUITAS DANA LANCAR				
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	16.714.592,00	37.177.244,00	(20.462.652,00)	-55,04%
<b>JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>16.714.592,00</b>	<b>37.177.244,00</b>	<b>(20.462.652,00)</b>	
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	4.512.890.325,00	2.499.861.375,00	2.013.028.950,00	80,53%
<b>JUMLAH EKUITAS INVESTASI</b>	<b>4.512.890.325,00</b>	<b>2.499.861.375,00</b>	<b>2.013.028.950,00</b>	
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>4.529.604.917,00</b>	<b>2.537.038.619,00</b>	<b>1.992.566.298,00</b>	<b>78,54%</b>

Sumber Data : Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kesbangpol & Linmas Tahun 2011

## B. Pembahasan

Tahun 2010				
URAIAN	ANGGARAN 2010	REALISASI 2010	SELISIH 2010	KETERANGAN
<b>BELANJA</b>	9.248.605.201,00	8.776.199.122,00	472.406.079,00	94,89%
BELANJA OPERASI	9.207.203.201,00	8.734.847.122,00	472.356.079,00	94,87%
Belanja Pegawai	5.698.780.201,00	5.414.207.246,00	284.572.955,00	95,01%
Belanja Barang	3.508.423.000,00	3.320.639.876,00	187.783.124,00	94,65%
BELANJA MODAL	41.402.000,00	41.352.000,00	50.000,00	99,88%
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Sumber Data : Lampiran 1 Perda Pertanggungjawaban-Laporan Realisasi Anggaran

Tahun 2011				
URAIAN	ANGGARAN 2011	REALISASI 2011	SELISIH 2011	KETERANGAN
<b>BELANJA</b>	12.606.093.912,88	12.083.534.993,00	522.558.919,88	95,85%
BELANJA OPERASI	11.897.677.230,88	11.381.536.543,00	516.140.687,88	95,66%
Belanja Pegawai	6.648.932.230,88	6.325.272.827,00	323.659.403,88	95,13%
Belanja Barang	5.248.745.000,00	5.056.263.716,00	192.481.284,00	96,33%
BELANJA MODAL	708.416.682,00	701.998.450,00	6.418.232,00	99,09%
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Sumber Data : Lampiran 1 Perda Pertanggungjawaban-Laporan Realisasi Anggaran

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Sesuai hasil analisis dan pembahasan tentang Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesbangpol & Linmas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesbangpol & Linmas Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011

cenderung meningkat dibandingkan Tahun 2010 dengan alasan :

1. Peningkatan anggaran daerah terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesbangpol & Linmas Kabupaten Kutai Barat diikuti dengan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif hal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen belanja daerah.

2. Sesuai dengan pengajuan hipotesis terdahulu bahwa, jika Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesbangpol & Linmas cenderung mengalami peningkatan maka hipotesis diterima.

#### **Saran-Saran**

Adapun saran-saran yang bisa penulis berikan sehubungan dengan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesbangpol & Linmas di Kabupaten Kutai Barat, adalah sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesbangpol & Linmas sebaiknya terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai selama ini, dan dimasa yang akan datang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Ahyari, Agus, 1988, *Anggaran Perusahaan*, BPFE, Yogyakarta.
- [2] Baridwan, Zaki, 2004: *Intermediate Accounting*, Edisi 8 Cetakan Pertama, BPEE, Yogyakarta.
- [3] Badan Kesbangpol & Linmas, 2011, *RENSTRA 2011-2016*, Sendawar.
- [4] Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti, 2004, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Edisi keempat Cetakan Pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- [5] Munawir, S. 2007, *Analisa Laporan Keuangan*, Edisi Keempat, Cetakan Keempatbelas, Liberty, Yogyakarta.
- [6] Mahmudi, 2009, *Manajemen Keuanagn Daerah*, Erlangga, Yogyakarta.
- [7] Riyanto, Bambang, 2001, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi 4, Cetakan Ketujuh, BPFE, Yogyakarta.
- [8] Wahyuni, Nurlily, 2009, *Kinerja Keuangan PT. Daksa Kalimantan Putra Di Samarinda*.